

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBAPANAS NOMOR 10 TAHUN 2022  
SERTA FAKTOR – FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

***IMPLEMENTATION OF PERBAPANAS REGULATION NUMBER 10 OF 2022  
AND SUPPORTING AND INHIBITING FACTORS AT THE FOOD SECURITY,  
FOOD CROPS, AND HORTICULTURE SERVICE OF OGAN KOMERING ILIR  
REGENCY***

**Widya Novita<sup>1</sup>, Agoes Thony Ak<sup>2</sup>, Farid Wadjdi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

<sup>a</sup>Korespondensi: Widya Novita, Email: widya.bkpoki@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan melibatkan informan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan). Data dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya menunjukkan kepatuhan dalam metodologi dan indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, namun sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia internal. Daya tanggap terhadap kondisi geografis dan demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir juga terlihat, tetapi terhambat oleh minimnya koordinasi dan komitmen data dari Instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan. Faktor pendukung utama meliputi adanya regulasi yang jelas dan potensi dukungan dari pemerintah daerah, sementara faktor penghambat didominasi oleh ego sektoral, kualitas data yang bervariasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal di berbagai instansi. Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memerlukan penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang substansial, bukan hanya kepatuhan administratif. Saran strategis meliputi peningkatan komitmen pemerintah daerah melalui regulasi yang mengikat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir dan instansi terkait, standardisasi serta integrasi sistem data antar-dinas, serta optimalisasi pemanfaatan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk perencanaan program yang lebih terarah dan relevan.

Kata Kunci: implementasi, peta ketahanan, kerentanan pangan

**Abstract**

This study uses a qualitative approach with a case study method, involving informants from the Food Security, Food Crops, and Horticulture Service of Ogan Komering Ilir Regency, the Central Bureau of Statistics of Ogan Komering Ilir Regency, and Regional Apparatus Organizations (Bappeda, Social Service, Health Service, Trade Service, Transportation Service). Data were collected through interviews, questionnaires, and document analysis. The results indicate that the Food Security, Food Crops, and Horticulture Service of Ogan Komering Ilir Regency strives to demonstrate compliance with the methodology and indicators of the Food Security and Vulnerability Map. However, it is often constrained by limited budgets and internal human resource capacity. Responsiveness to the geographical and demographic conditions of Ogan Komering Ilir Regency is also evident, but hindered by minimal coordination and data commitment from related agencies such as the Central Bureau of Statistics, Bappeda, Social Service, Health Service, Trade Service, and Transportation Service. The main supporting factors include clear regulations and potential support from the local government, while inhibiting factors are dominated by sectoral egos, varying data quality, and suboptimal human resource capacity across various agencies. It is concluded that the successful implementation of the Food Security and Vulnerability Map policy in Ogan Komering Ilir Regency requires substantial strengthening of cross-sectoral synergy and collaboration, rather than mere administrative compliance. Strategic recommendations include enhancing

local government commitment through binding regulations, developing human resource capacity in the Food Security, Food Crops, and Horticulture Service and related agencies, standardizing and integrating inter-agency data systems, and optimizing the use of the Food Security and Vulnerability Map results for more targeted and relevant program planning.

Keywords: implementation, food security map, food vulnerability

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan nasional (Salasa, 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah wajib membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi (Sutrisno, 2022). Sistem ini menjadi dasar perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan. Hal tersebut ditegaskan kembali melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Bapanas, 2022).

Menurut teori ketahanan pangan yang dikemukakan oleh Quaralia (2022), ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka agar dapat hidup aktif dan sehat. Sejalan dengan itu, Suryawati (2019) menambahkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga terkait akses masyarakat terhadap pangan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Dengan demikian, konsep ketahanan pangan tidak hanya sebatas pada penyediaan pangan, tetapi juga bagaimana pangan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun untuk mendukung tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Ketiga pilar tersebut memerlukan dukungan lingkungan strategis seperti stabilitas ekonomi makro, iklim, agroekologi, ketersediaan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik (Khusnuliawati et al., 2022). Menurut Osmani (2023) dalam teori *entitlement approach*, masalah kerawanan pangan sering kali bukan hanya akibat kelangkaan pangan, tetapi juga ketidakmampuan rumah tangga atau individu untuk mengakses pangan karena keterbatasan sumber daya ekonomi maupun sosial.

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis maupun transien. Menurut Apriyanto & Rujiah (2021), kerawanan pangan kronis terjadi akibat faktor struktural seperti distribusi pendapatan, kondisi sosial budaya, maupun sistem pemerintahan yang tidak mendukung. Sementara itu, kerawanan transien lebih bersifat jangka pendek karena dipicu oleh faktor dinamis seperti bencana, konflik, atau fluktuasi harga pangan. Jika tidak diantisipasi, kerawanan transien yang berulang dapat menurunkan aset rumah tangga dan akhirnya berkembang menjadi kerawanan kronis. Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara nasional sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia termasuk dalam kategori tahan pangan, meskipun sekitar 12,06 persen masih tergolong rawan pangan. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kondisi relatif lebih baik dengan 85,02 persen desa masuk kategori tahan pangan dan 14,98 persen desa rentan pangan. Kondisi ini menguatkan pandangan Atasa et al. (2022) bahwa ketersediaan pangan akan selalu menjadi isu fundamental dalam dinamika kependudukan, sehingga perlu diantisipasi dengan tata kelola pangan yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten OKI, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diambil dengan metode survei. Menurut Salamadian (2019), apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel (10-15)% atau (20-25)% atau lebih. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mengambil sampel sebesar 20% yaitu masing-masing 35 petani contoh dari 175 anggota populasi di Desa Sedupi dan 176 anggota populasi di Desa Raja Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami secara mendalam implementasi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau gejala yang diteliti berdasarkan data kualitatif (kata-kata, narasi, pengalaman, dokumen, atau perilaku) (Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial secara holistik dalam konteks alami.

Lokasi penelitian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan waktu pelaksanaan mulai Mei hingga Juli 2025. Lokasi ditentukan *secara purposive*, karena dinas tersebut merupakan pelaksana utama kebijakan yang diteliti. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis. Grindle menekankan dua dimensi penting: konten kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan, pelaksana, sumber daya, dan lokasi pengambil keputusan) serta konteks kebijakan (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap) (Engkus, 2020). Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan publik.

Informan penelitian ditentukan dengan metode purposive, bukan responden seperti pada penelitian kuantitatif. Metode purposive adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menentukan responden atau unit analisis berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling relevan, representatif, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Sondakh et al., 2021). Informan terdiri dari 9 orang, meliputi Kepala Dinas, pejabat bidang ketahanan pangan, perencana, serta perwakilan OPD terkait seperti BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan Kabupaten OKI. Hal ini sesuai pandangan Heryana & Unggul (2018) bahwa informan adalah partisipan penelitian yang menjadi sumber data utama.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi primer yang detail, kuesioner untuk menggali faktor pendukung dan penghambat kebijakan, sedangkan dokumentasi untuk memperkuat data melalui arsip dan literatur relevan. Sejalan dengan Ridwan et al. (2021),

sumber utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara dokumen berfungsi sebagai pelengkap.

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data tanpa menggunakan analisis statistik. Proses analisis diarahkan untuk menilai implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 dengan menggunakan indikator dari teori Grindle, baik pada aspek isi kebijakan maupun konteks pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi dasar yuridis penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) di tingkat pusat hingga daerah. Peta ini berfungsi sebagai sarana informasi strategis yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pangan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) yang mencakup kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, dan alokasi sumber daya; serta konteks implementasi (context of implementation) yang meliputi kekuasaan, strategi aktor, dan karakteristik lembaga (Ayuningtias et al., 2021).

#### **Isi Kebijakan (Content of Policy)**

##### ***Kepentingan Kelompok Sasaran***

Menurut Grindle, kepentingan kelompok sasaran (interests affected) merupakan elemen penting dalam isi kebijakan (Gani, 2018). Implementasi tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu memengaruhi kelompok tertentu yang dapat memperoleh manfaat atau sebaliknya mengalami kerugian. Dukungan maupun resistensi akan muncul tergantung sejauh mana kepentingan mereka diakomodasi.

Dalam konteks Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022, kelompok sasaran yang terdampak di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:

- Dinas Ketahanan Pangan: berkepentingan memastikan data akurat sebagai dasar program ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi.
- Bappeda & Pemerintah Daerah: menggunakan peta sebagai indikator pembangunan, acuan intervensi daerah rawan pangan, serta efisiensi alokasi anggaran.
- BPS: berkepentingan menyediakan data statistik yang valid dan terintegrasi.
- Dinas Sosial: memanfaatkan peta untuk menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
- Dinas Perdagangan: menggunakan peta untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan.
- Dinas Perhubungan: mendukung pembangunan infrastruktur transportasi untuk akses pangan di wilayah rentan.
- Dinas Kesehatan: mengaitkan kerentanan pangan dengan masalah gizi, kesehatan masyarakat, dan stunting.

Sejalan dengan pandangan Grindle, kepentingan-kepentingan tersebut menunjukkan bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pangan, akuntabilitas pemerintah daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan.

### ***Tipe Manfaat***

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan salah satunya oleh tipe manfaat (types of benefits) yang dihasilkan (Yuliah, 2020). Manfaat yang jelas, positif, dan dirasakan oleh kelompok sasaran akan mendorong partisipasi dan mempermudah evaluasi keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, manfaat yang tidak merata atau menimbulkan konflik antar kelompok dapat menghambat implementasi.

Dalam implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022, tipe manfaat yang dihasilkan terbagi menjadi:

1. Manfaat Material (Tangible)
  - Bantuan pangan tepat sasaran: peta menjadi dasar penyaluran bantuan pangan, subsidi beras, bibit, atau pupuk bagi masyarakat rentan.
  - Alokasi anggaran yang efisien: pemerintah daerah dapat mengarahkan dana pembangunan pangan lebih efektif, misalnya pada infrastruktur irigasi atau wilayah rawan pangan.
  - Pengembangan infrastruktur pendukung pangan: mendorong pembangunan lumbung, gudang, dan akses transportasi pertanian di daerah prioritas.
2. Manfaat Non-Material (Intangible)
  - Data pangan akurat dan terstandardisasi: menghasilkan basis data komprehensif untuk analisis dan perumusan kebijakan.
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan: memperkuat SDM, teknologi, dan prosedur kerja di Dinas Ketahanan Pangan.
  - Koordinasi lintas instansi: mendorong sinergi antar-OPD seperti Bappeda, BPS, Dinas Sosial, Perdagangan, Perhubungan, dan Kesehatan.
  - Kesadaran publik: peta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu pangan di wilayahnya.
  - Reputasi dan akuntabilitas pemerintah daerah: memperlihatkan komitmen daerah dalam mengatasi kerentanan pangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Tipe manfaat kebijakan ini sebagian besar bersifat non-material yang memperkuat data, kapasitas, dan koordinasi antar instansi, namun juga mendukung manfaat material melalui distribusi bantuan dan pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan teori Grindle, manfaat yang beragam ini menjadi pendorong utama partisipasi, efektivitas implementasi, dan efisiensi intervensi dalam mengatasi kerentanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### ***Derajat Perubahan yang Diinginkan***

Menurut Grindle, setiap kebijakan publik memiliki derajat perubahan (degree of change) yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Masnah, 2021). Semakin besar derajat perubahan yang dituntut, semakin tinggi pula kebutuhan akan sumber daya (SDM, teknologi, anggaran) serta koordinasi lintas sektor. Kebijakan dengan target perubahan yang tinggi juga cenderung menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan kebijakan yang hanya memerlukan penyesuaian kecil.

Dalam konteks Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, derajat perubahan yang diinginkan dapat dikategorikan sebagai

reformasi bertahap menuju transformasi fundamental dalam sistem pengelolaan data pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perubahan yang ditargetkan meliputi:

- Dari segi kelembagaan: penyusunan peta yang sebelumnya bersifat periodik (lima tahunan, lalu tiga tahunan) kini dilakukan setiap tahun dengan tingkat detail sampai level desa.
- Dari segi metodologi: penggunaan indikator yang lebih spesifik (ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas), integrasi data dari berbagai instansi, serta penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- Dari segi kapasitas SDM: peningkatan kemampuan staf dalam analisis data spasial, penguasaan perangkat lunak, serta kebutuhan infrastruktur teknologi.
- Dari segi kebijakan publik: keputusan program pangan tidak lagi berdasarkan intuisi, tetapi pada data kuantitatif dan spasial yang dapat memetakan wilayah prioritas secara lebih tepat.
- Dari segi kolaborasi: keterlibatan lintas instansi (Bappeda, BPS, Dinas Sosial, Perdagangan, Perhubungan, Kesehatan, dan lainnya) untuk menghasilkan peta yang lebih valid dan komprehensif.

Hasil wawancara dengan berbagai aktor menunjukkan ragam persepsi terhadap perubahan:

- Bappeda: mengharapkan integrasi data yang lebih sistematis untuk mendukung alokasi anggaran dan pembangunan wilayah rawan pangan.
- Dinas Sosial: melihat manfaat dalam penajaman target bantuan sosial.
- Dinas Perdagangan: memanfaatkan peta untuk memantau pasokan dan harga pangan.
- Dinas Perhubungan: menggunakannya sebagai dasar prioritas pembangunan infrastruktur jalan menuju wilayah rawan pangan.
- Dinas Kesehatan: menargetkan program gizi dan penanggulangan stunting berbasis data spasial.
- BPS: menekankan pentingnya harmonisasi metodologi dan validasi data agar sesuai kebutuhan penyusunan peta.

Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas, akurasi, dan integrasi data pangan berbasis spasial sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori Grindle bahwa kebijakan dengan derajat perubahan tinggi membutuhkan komitmen besar dari implementator, baik dalam hal sumber daya, koordinasi antar instansi, maupun kapasitas teknologi, namun juga berpotensi membawa dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ketahanan pangan daerah.

### ***Letak Pengambil Keputusan***

Menurut Grindle, letak pengambil keputusan dalam kebijakan publik berhubungan dengan posisi aktor utama yang menentukan arah, isi, dan proses kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan rencana, perumusan, hingga pengesahan (Desrinelti et al., 2021). Letak pengambil keputusan sangat menentukan konsistensi kebijakan, ruang adaptasi daerah, serta keberhasilan implementasinya.

Dalam konteks Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022, pengambil keputusan utama adalah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan dukungan BPS, Bappenas, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bapanas berperan menetapkan:

- Indikator baku peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- Definisi operasional dan metodologi analisis yang harus seragam di seluruh Indonesia.
- Pedoman implementasi dan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah.

Konsekuensinya, daerah memiliki ruang terbatas untuk mengubah metodologi yang sudah ditetapkan, tetapi tetap memiliki kewenangan dalam keputusan operasional. Misalnya:

- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir memutuskan mekanisme pelaksanaan pedoman, pembentukan tim pelaksana, alokasi anggaran lokal, serta koordinasi lintas instansi (BPS, Bappeda, Dinas Pertanian, Sosial, Perdagangan, Kesehatan, dan Perhubungan).
- Dinas ini juga bertanggung jawab menyusun laporan peta yang spesifik untuk wilayah Kabupaten OKI, lalu melaporkannya ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan demikian, letak pengambil keputusan berada di tingkat pusat (Bapanas) untuk substansi dan standar metodologi, namun di tingkat daerah (DKPTPH OKI) untuk aspek teknis operasional. Hal ini mencerminkan kombinasi sentralisasi standar dan desentralisasi pelaksanaan, sebagaimana dipaparkan dalam teori Grindle.

### ***Pelaksana Kebijakan***

Menurut Grindle, pelaksana kebijakan adalah aktor individu, kelompok, atau organisasi yang bertanggung jawab mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas, kompetensi, motivasi, serta dukungan organisasi dari para pelaksana (FIRMANSYAH et al., 2022).

Dalam implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022, pelaksana kebijakan terbagi pada beberapa level:

- Tingkat pusat: Badan Pangan Nasional sebagai perumus pedoman.
- Tingkat provinsi: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai fasilitator.
- Tingkat kabupaten/kota: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir (leading sector).

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksana kebijakan di Kabupaten OKI antara lain:

1. Kapasitas sumber daya: ketersediaan ASN dengan keahlian data dan SIG, serta kecukupan anggaran untuk survei dan perangkat lunak.
2. Kompetensi dan pengetahuan: pemahaman staf terhadap metodologi, indikator, dan teknologi SIG.
3. Motivasi dan komitmen: kesediaan pelaksana menjalankan kebijakan meski menambah beban kerja.
4. Dukungan organisasi: keterlibatan kepala dinas dan birokrasi daerah.
5. Koordinasi lintas OPD: dukungan dari Dinas Sosial, Perdagangan, Kesehatan, Perhubungan, BPS, dan Bappeda sebagai penyedia data.
6. Kondisi lapangan: tantangan geografis, sosial-ekonomi, dan infrastruktur yang bervariasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- DKPTPH OKI adalah pelaksana utama, khususnya melalui Bidang Ketahanan Pangan.
- Bappeda memfasilitasi koordinasi dan integrasi peta dalam perencanaan pembangunan.
- Dinas Sosial menggunakan peta untuk menargetkan penerima bantuan.
- Dinas Perdagangan memanfaatkannya untuk pemantauan harga dan pasokan.
- Dinas Kesehatan menggunakannya untuk penentuan program gizi dan stunting.
- Dinas Perhubungan menjadikannya dasar pembangunan akses jalan pangan.
- BPS bertindak sebagai penyedia data dan mitra metodologis.

Pelaksana kebijakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berperan sebagai motor teknis implementasi Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan DKPTPH OKI dalam mengkoordinasikan lintas instansi, meningkatkan kapasitas teknis staf, dan memanfaatkan dukungan data serta metodologi dari BPS.

### ***Sumber Daya yang Dilibatkan***

Menurut Grindle, sumber daya adalah salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik (Pambudi & Hidayat, 2022). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai—baik manusia, finansial, material, maupun informasi—bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit diimplementasikan. Sumber daya berperan sebagai “bahan bakar” yang menggerakkan mesin implementasi. Kekurangan sumber daya dapat menurunkan motivasi pelaksana, sementara ketersediaan yang cukup meningkatkan efektivitas serta moral aparat.

Dalam implementasi Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sumber daya yang dilibatkan mencakup:

1. **Sumber Daya Keuangan**  
Anggaran berasal dari APBN melalui Badan Pangan Nasional dan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan pelatihan, pengumpulan data, pembelian perangkat lunak, dan operasional teknis penyusunan peta.
2. **Sumber Daya Manusia (SDM)**  
Terdiri atas tim penyusun yang melibatkan Kepala Dinas, Bidang Ketahanan Pangan, staf ahli data dan SIG, serta dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sebagai penyedia data (BPS, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Bappeda). Kompetensi teknis, terutama dalam pengolahan data statistik dan pemetaan, menjadi faktor penentu keberhasilan.
3. **Sumber Daya Material/Fisik**  
Perangkat keras berupa komputer/laptop dengan spesifikasi tinggi, serta perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti ArcGIS/QGIS untuk pemetaan spasial dan perangkat analisis data seperti Excel/SPSS. Ketersediaan akses internet juga menjadi kebutuhan penting dalam proses integrasi data.
4. **Sumber Daya Informasi**  
Data yang bersumber dari OPD terkait, database internal Dinas Ketahanan Pangan, serta pedoman teknis dari Badan Pangan Nasional. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan indikator, metodologi, serta penyusunan peta yang akurat dan komparabel antar wilayah.

Kebijakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat bergantung pada optimalisasi keempat jenis sumber daya di atas. Sejalan dengan teori Grindle, ketersediaan dan kualitas sumber daya ini akan menentukan apakah kebijakan hanya berhenti pada tataran dokumen, atau mampu diimplementasikan secara efektif hingga memberikan manfaat nyata bagi daerah.

### **Konteks Implementasi (context of implementation)**

#### ***Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat***

Menurut Novita Sari et al. (2020), implementasi kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan waktu tertentu. Tanpa implementasi, kebijakan hanya menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata. Dalam kerangka teori Grindle, tingkat keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh strategi,



sumber daya, serta posisi kekuasaan aktor-aktor yang terlibat. Interaksi antar aktor dengan kepentingan berbeda inilah yang menentukan efektivitas jalannya kebijakan (Nawangsari & Sari, 2019).

Dalam konteks implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, aktor-aktor utama yang terlibat memiliki kepentingan, kekuasaan, dan strategi yang beragam:

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Aktor Sentral)
  - Kepentingan: memperkuat peran sebagai leading sector ketahanan pangan; memastikan program tepat sasaran berbasis data; memperoleh dukungan regulasi dan alokasi anggaran lebih besar.
  - Kekuasaan: memiliki otoritas birokrasi untuk mengorganisir, membentuk tim, mengelola anggaran, serta mengkoordinasikan lintas sektor.
  - Strategi: membentuk tim penyusun, menjalin koordinasi dengan OPD lain, mengajukan dukungan teknis ke provinsi/Bapanas, serta mengusulkan anggaran dalam APBD.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  - Bupati: berperan sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi di daerah; mendukung visi pembangunan ketahanan pangan; strateginya berupa instruksi, surat edaran, serta alokasi anggaran.
  - Bappeda: berkepentingan pada data perencanaan pembangunan yang valid; berkuasa dalam integrasi program lintas sektor; strateginya mengintegrasikan peta dalam RPJMD/RKPD serta memfasilitasi koordinasi antar-OPD.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendukung
  - Dinas Perdagangan: menyuplai data ketersediaan pangan (pasar, UMKM, sarana distribusi).
  - Dinas Sosial: menyuplai data kesejahteraan rumah tangga miskin.
  - Dinas Perhubungan: menyediakan data aksesibilitas desa (infrastruktur transportasi).
  - Dinas Kesehatan: menyediakan data pemanfaatan pangan (akses air bersih, tenaga kesehatan, gizi).
4. Badan Pusat Statistik (BPS)
  - Kepentingan: menjaga kredibilitas data statistik yang akurat dan valid.
  - Kekuasaan: sebagai sumber utama data demografi, sosial, dan ekonomi dengan standar metodologi nasional.
  - Strategi: menyediakan data yang relevan, melakukan koordinasi, dan memberikan pelatihan teknis terkait interpretasi data.

Implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat bergantung pada sinkronisasi kepentingan, pemanfaatan kekuasaan, dan efektivitas strategi antar aktor. Sejalan dengan teori Grindle, apabila kepentingan tidak selaras, kekuasaan tidak mendukung, atau strategi kurang efektif, maka kebijakan berpotensi menghadapi hambatan signifikan. Sebaliknya, jika aktor-aktor mampu berkoordinasi dengan baik, peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat dihasilkan secara akurat dan menjadi dasar perumusan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.

#### ***Karakteristik Lembaga dan Penguasa***

Dalam perspektif Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek penting dalam konteks lingkungan implementasi, yaitu karakteristik lembaga pelaksana dan karakteristik penguasa (Darmasaputra & Hariani, 2019). Keduanya merepresentasikan kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

### 1. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Lembaga pelaksana kebijakan dapat diukur dari visi, misi, tugas pokok dan fungsi, serta indikator kinerja utama yang dimilikinya. Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ilir, lembaga pelaksana utama adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- Kapasitas Internal: masih berada pada tahap berkembang, dengan kebutuhan penguatan di bidang sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, peralatan pendukung, serta prosedur organisasi.
- Sumber Daya Manusia: terbatas, khususnya tenaga ahli di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang sangat penting untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- Sumber Daya Finansial: alokasi anggaran sering kali belum sepadan dengan kebutuhan operasional, terutama dalam aspek pengumpulan data dan pengembangan teknologi berbasis GIS.
- Budaya Organisasi dan Koordinasi Internal: adaptasi terhadap metodologi baru berbasis teknologi masih terbatas, dan koordinasi antar bidang di internal dinas belum sepenuhnya terintegrasi.

### 2. Karakteristik Penguasa (Pemerintah Daerah)

Lingkungan politik dan sistem pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga turut memengaruhi implementasi kebijakan.

- Dukungan Normatif: secara umum pemerintah daerah mendukung isu ketahanan pangan, namun dukungan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk prioritas kebijakan yang konsisten.
- Dukungan Sumber Daya: keterbatasan muncul pada aspek dukungan legislatif terhadap anggaran serta kapasitas koordinasi lintas sektor antar OPD.
- Komitmen Politik: meskipun ada pengakuan terhadap pentingnya peta ketahanan pangan, pemahaman dan komitmen substantif dari pengambil keputusan masih perlu diperkuat agar dapat mengarahkan program ini sebagai prioritas pembangunan daerah.

### 3. Dampak dari Karakteristik Lembaga dan Penguasa

- Dampak Internal: (a) keterbatasan SDM ahli SIG, (b) alokasi anggaran yang minim, (c) adaptasi terhadap metodologi baru yang masih lambat, (d) koordinasi internal yang belum optimal.
- Dampak Eksternal: (a) komitmen kepala daerah yang belum konsisten, (b) ketersediaan data yang tidak selalu sesuai kebutuhan, (c) keterbatasan alokasi anggaran daerah, (d) pemahaman lembaga penguasa tentang pentingnya peta yang masih kurang, (e) kebijakan pusat yang belum sepenuhnya terinterpretasi dengan baik di tingkat daerah.

Implementasi Perbapanas Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat dipengaruhi oleh adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan baru dengan kapasitas lembaga pelaksana dan dukungan penguasa. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta peralatan di Dinas Ketahanan Pangan, ditambah dengan koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta dukungan politik yang belum konsisten, menjadi faktor krusial yang harus diperkuat agar tujuan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat tercapai secara efektif.

### ***Kepatuhan dan Daya Tanggap***

Efektivitas implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepatuhan para pelaksana terhadap aturan yang ditetapkan serta daya tanggap (responsiveness) mereka dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan. Menurut perspektif implementasi

kebijakan, kegagalan implementasi sering kali terjadi akibat rendahnya tingkat kepatuhan maupun lemahnya respons pelaksana terhadap dinamika kebijakan.

Dalam konteks implementasi Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, kepatuhan diwujudkan melalui:

1. Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang melibatkan lintas sektor.
2. Penetapan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang penyusunan peta sebagai dasar hukum pelaksanaan.
3. Integrasi indikator penyusunan peta yang mengacu pada petunjuk teknis nasional dan dianalisis hingga tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, diketahui bahwa seluruh kegiatan penyusunan peta telah mengacu pada petunjuk teknis resmi. Hal ini mencakup penggunaan indikator, metodologi pengumpulan data, validasi data dari lintas dinas, serta pelaporan yang transparan ke Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, Kasubbag Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi menegaskan bahwa salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pemetaan daerah tahan dan rentan pangan. Peta ini dianggap krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan berbasis data yang akurat.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa:

- Kepatuhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura cukup tinggi, terlihat dari konsistensi mengikuti petunjuk teknis, pembentukan tim, dan mekanisme pelaporan yang sesuai prosedur.
- Daya tanggap (responsiveness) pelaksana juga cukup baik, ditunjukkan dengan adanya koordinasi lintas sektor (BPS, OPD terkait), serta kemampuan menyesuaikan metodologi dan kebutuhan data di lapangan.
- Namun, efektivitas implementasi tetap bergantung pada keberlanjutan koordinasi, konsistensi dukungan anggaran, dan peningkatan kapasitas SDM agar peta yang dihasilkan benar-benar akurat dan bermanfaat.

Keberhasilan implementasi Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada aspek kepatuhan dan daya tanggap bergantung pada keseimbangan harmonis antara ketaatan pelaksana terhadap petunjuk teknis dan kemampuan merespons kebutuhan lapangan. Dengan kepatuhan yang kuat dan daya tanggap yang adaptif, peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ketahanan pangan daerah.

### **Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang hadir dalam lingkungan implementasi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari internal lembaga pelaksana maupun dari eksternal seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, dan geografis (Rizky et al., 2021). Dalam konteks implementasi Perbapenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditemukan dua kategori faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

#### ***Faktor Pendukung***

Faktor pendukung adalah elemen-elemen yang memfasilitasi dan mempercepat proses implementasi kebijakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan oleh Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Jelas  
Adanya Peraturan Bapanas Nomor 10 Tahun 2022 beserta petunjuk teknisnya memberikan legitimasi hukum dan arah kebijakan yang pasti. Dukungan dari Bupati melalui Surat Keputusan dan pengalokasian anggaran semakin memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kapasitasnya  
SDM yang memahami pentingnya peta ketahanan pangan serta memiliki keterampilan dasar dalam pengolahan data menjadi modal awal yang mendukung implementasi kebijakan.
3. Ketersediaan Data dan Teknologi  
Kemudahan akses data dari instansi terkait, tersedianya komputer dengan spesifikasi memadai, perangkat lunak pendukung (GIS, Excel, aplikasi statistik), serta internet yang stabil mendukung efektivitas pengolahan data.
4. Koordinasi Lintas Sektoral yang Efektif  
Komitmen instansi lain untuk berbagi data dan ikut terlibat dalam tim penyusunan peta menjadi salah satu faktor penting. Peran Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengintegrasikan peta ke dalam perencanaan pembangunan daerah juga memperkuat keberlanjutan program ini.
5. Dukungan Eksternal  
Pendampingan teknis dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pangan Nasional membantu meningkatkan kapasitas daerah dalam penyusunan peta berbasis GIS.

#### ***Faktor Penghambat***

Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang memperlambat atau mempersulit proses implementasi, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya  
Dana dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya mencukupi, ditambah keterbatasan akses peralatan teknologi yang canggih dan jaringan internet di beberapa wilayah.
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas  
Jumlah staf dengan keahlian khusus dalam bidang statistik, GIS, dan analisis ketahanan pangan masih terbatas. Minimnya pelatihan dan tingginya rotasi staf menyebabkan hilangnya kontinuitas pengetahuan dan pengalaman.
3. Masalah Data  
Tidak semua data tersedia di tingkat desa/kelurahan. Data yang ada pun sering kali tidak mutakhir, tidak konsisten, atau sulit diakses karena kendala birokrasi maupun perbedaan format antar-instansi. Hal ini berdampak pada validitas peta yang dihasilkan.
4. Koordinasi Lintas Sektoral yang Lemah  
Beberapa dinas masih bekerja dalam batas sektoral masing-masing dan enggan berbagi data. Perbedaan prioritas dan kurangnya pemahaman tentang peran peta dalam perencanaan pembangunan daerah semakin memperlemah koordinasi.
5. Tantangan Geografis dan Faktor Eksternal  
Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan teknis dalam pengumpulan data lapangan. Selain itu, perubahan kebijakan atau prioritas di tingkat pusat/provinsi dapat memengaruhi fokus dan ketersediaan sumber daya di daerah.

Faktor pendukung seperti regulasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, dan dukungan eksternal memberikan dasar yang kuat bagi implementasi kebijakan. Namun, faktor penghambat berupa keterbatasan SDM, anggaran, data, serta koordinasi antar-instansi perlu segera diatasi. Mengacu pada teori Grindle, keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat ini akan sangat menentukan apakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif atau justru mengalami hambatan signifikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara, penelitaan dokumen, peraturan serta data skunder lainnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, namun dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa tantangan teknis dan administratif. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berupaya menjalankan kebijakan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di daerah, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal
2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan antara lain adanya komitmen dari pemerintah dan dinas terkait, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu Faktor – faktor yang menghambat yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta masih minimnya pemahaman di tingkat pelaksana teknis mengenai substansi kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang belum maksimal.

### Saran

Terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis memiliki saran yang ingin diajukan untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penulis selanjutnya, antara lain :

1. Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Teknis

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar pelaksana kebijakan memahami substansi dan tujuan kebijakan secara lebih mendalam.

2. Optimalisasi Anggaran dan Sarana Prasarana

Pemerintah daerah perlu menambah alokasi anggaran yang memadai dan memastikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Perlu dibentuk forum koordinasi reguler antarinstansi terkait agar sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan ketahanan pangan dapat lebih terarah.

4. Pemanfaatan Regulasi dan Dukungan Pemerintah

Dukungan regulasi yang ada hendaknya diperkuat dengan penetapan kebijakan turunan di tingkat daerah (Peraturan Bupati/SK Bupati) sebagai bentuk legitimasi dan komitmen nyata dalam implementasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Dinas terkait perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengidentifikasi kendala teknis-administratif serta merumuskan langkah perbaikan secara berkesinambungan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada Universitas Sjakhyakirti dan Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti yang telah membantu selama berlangsungnya penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, M., & Rujiah, R. (2021). *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan Menggunakan Metode Gis (Geographic Information System). Journal of Food System and Agribusiness*. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v5i1.1976>
- Atasa, D., Laily, D. W., & Wijayanti, P. D. (2022). *Dinamika Ketersediaan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Malang. Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.30737/agrinika.v6i1.2171>
- Ayuningtias, I., . S., & Faisol, M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>
- Bapanas. (2022). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2022). Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2022*.
- Darmasaputra, A. B., & Hariani, D. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi Tepat Pembuangan Akhir Randu Kuning Tegalsari). Journal of Public Policy and Management Review*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Engkus, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. Jurnal Governansi*. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2388>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Surip, S., & Rizkiani, F. (2022). *Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Ilmiah Mandala Education*. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3828>
- Gani, D. R. (2018). *Kelompok Sasaran Kegiatan Literasi Digital. JURNAL ILMU KOMUNIKASI*. <https://doi.org/10.33005/jkom.v1i1.7>
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul*.
- Khusnuliawati, H., Sukmanaji, S., & Hari Saputro Al Hari, F. (2022). *Implementasi Q-Gis dalam Pembuatan Aplikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Salatiga Berbasis Web. Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i9.460>
- Masnah, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance*. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>

- Nawangsari, E. R., & Sari, W. K. (2019). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance*. *Public Administration Journal of Research*. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.12>
- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City*. *Journal of Governance Innovation*. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Osmani, S. (2023). *The Entitlement Approach to Famine: An Assessment*. In *Choice, Welfare, and Development*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198287896.003.0013>
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). *Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional*. *Bappenas Working Papers*. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131>
- Quaralia, P. S. (2022). *Kerjasama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi kasus ASEAN*. *Padjadjaran Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.37614>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*. *Jurnal Masohi*. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rizky, U. F., Alparozzi, S., Taufan, R., Ramatillah, D. L., Rofii, A., Khoirunnisa, K., Kusuma, D., & Wijonarko, P. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terhadap Keberhasilan Pelaksanaan MBKM di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*. <https://doi.org/10.52447/promedia.v7i2.5536>
- Salamadian. (2019). *10 Teknik Pengambilan Sampel dan Penjelasannya Lengkap (SAMPLING)*. *Salamadian.Com*.
- Salasa, A. R. (2021). *Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia*. *Jejaring Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sondakh, F., Tommy, P., Mangantar, M., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2021). *Metode Purposive Sampling*. *Encyclopedia of Production and Manufacturing Management*.
- Suryawati, I. (2019). *Strategi Ketahanan Pangan Indonesia dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pada Berita Tirto.Id)*. *Jurnal Komunikatif*. <https://doi.org/10.33508/jk.v8i1.2058>
- Sutrisno, A. D. (2022). *Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah*. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4862>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Yuliah, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>